INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo

Tujuan : 1. Mewujudkan rancangan produk hukum daerah yang sistemik dan terkoordinasi;

2. Mewujudkan peningkatan kinerja penanganan perkara, dan bantuan hukum;

3. Mewujudkan layanan informasi dan publikasi hukum yang cepat dan akurat.

Tugas : Merumuskan kebijakan, penyusunan dan penyelenggaraan program pembinaan administrasi dan sumber daya di bidang

hukum

Fungsi : 1. Pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan urusan dibidang kewenangannya;

2. Pengoordinasian pelaksanaan program urusan dibidang kewenangannya;

3. Pengoordinasian pelayanan adminstrasi urusan dibidang kewenangannya;

4. Pelaksanaan pembinaan, pemantuan dan evaluasi urusan dibidang kewenangannya;

5. Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Bagian Hukum;

6. Pelaksanaan ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Bagian Hukum;

7. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya Peningkatan Sistem Informasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah (Perda dan Perwali) yang Diinformasikan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Dipublikasikan Jumlah Seluruh Produk Hukum Daerah yang Dihasilkan x 100%	Data Produk Hukum	Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
2.	Terwujudnya Produk Hukum yang sesuai dengan peraturan yang ada	Persentase Produk Hukum yang Sesuai Dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum	Jumlah Seluruh Produk Hukum yang Ditetapkan Jumlah Seluruh Produk Hukum yang Diusulkan * 100% KET: Produk Hukum meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota	Data Produk Hukum	Sub Bagian Peraturan Perundang- Undangan
3.	Terselesainya Perkara di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase perkara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Jumlah Perkara yang Ditangani x 100%	Data Perkara	Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyelesaian Sengketa